

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280694/peraturan-brino-1-tahun-2024>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Tentang layanan darurat 112*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). (2020). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019). *Kebijakan SPBE tingkatkan keterpaduan dan efisiensi instansi pemerintah*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kebijakan-spbe-tingkatkan-keterpaduan-dan-efisiensi-instansi-pemerintah>.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*. <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-3-tahun-2003>
- Pemerintah Indonesia. (2018a). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/155>
- Pemerintah Indonesia. (2018b). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahun+2003+tanggal+9+juni+2003
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/253990/perda-kab-probolinggo-no-1-tahun-2022>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2014). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-government>